

BAB IV

KESIMPULAN

Perubahan kelembagaan politik sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945 telah menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pula pada mekanisme elektoral, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Suksesi kepemimpinan tidak lagi tergantung pada proses politik terbatas di parlemen, melainkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pada pemilu 2004 ini, rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa memberikan mandat kepada MPR. Sebagai sesuatu yang baru, pemilihan presiden secara langsung tentunya akan melahirkan berbagai konsekuensi baru pula. Salah satu konsekuensinya adalah legitimasi yang dimiliki presiden terpilih nantinya akan sangat besar karena ia memperoleh mandat langsung dari rakyat.

Fakta bahwa Megawati berhadapan dengan SBY di putaran kedua pemilu presiden menjadikan pemilu putaran kedua sebagai kompetisi antara incumbent (pejabat) dengan challenger (penantang). Kondisi ini cenderung positif bagi demokratisasi di Indonesia dimasa datang karena akan menjadi pelajaran bagi presiden yang sedang menjabat bahwa untuk dapat terpilih lagi pada periode berikut, ia harus menunjukkan kinerja yang baik dalam pemerintahan agar mayoritas rakyat tetap menaruh kepercayaan kepadanya. Ada dua faktor yang dianggap akan menentukan hasil pemilu presiden mendatang, yakni keberadaan mesin politik

pendukung calon presiden (dalam hal ini adalah partai politik) dan pelaksanaan kampanye dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari pemilih.

Dalam hal mesin politik, Megawati dan tim suksesnya lebih tertuju pada pendekatan elite, yakni membangun komunikasi politik lewat pimpinan partai (elite partai) terlebih yang dianggap mempunyai kekuatan besar di parlemen. Representasi dari pendekatan elite tersebut adalah dengan menjalin kerja sama dalam bentuk pembangunan koalisi dengan beberapa partai politik. Tercatat ada enam partai politik yang berkoalisi dengan PDI-P untuk memenangkan Megawati dalam pemilu presiden 2004. Ke-enam partai politik tersebut adalah: Partai Golkar, PPP, PDS, PBR, PKPB, dan PNI Marhaenisme yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Koalisi Kebangsaan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2004. Koalisi Kebangsaan yang dibangun Megawati memiliki dampak yang sangat penting, yakni terciptanya mayoritas suara di parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, koalisi ini belum tentu akan efektif. Sebab, seperti lazimnya koalisi di Indonesia, koalisi dibangun hanya berdasarkan kepentingan politik semata, bukan dibangun oleh ideologi dan visi partai. Artinya, bangunan semacam ini mudah labil dan bubar ditengah jalan ketika kepentingan politik mereka tidak tercapai atau distribusi kepentingan tidak merata.

Sementara Megawati mendekati partai politik secara organisatoris, SBY lebih cenderung mengabaikan ikatan partai. Pola ini terbentuk karena kepercayaan mereka pada dukungan rakyat pada pemilu presiden putaran pertama. Namun, bukan berarti SBY menafikan keberadaan partai politik. Sejak awal SBY mencanangkan

sebuah koalisi terbatas untuk mendukung pemerintahannya. Koalisi yang diinginkan SBY adalah koalisi yang memperkuat pemerintahannya dan menjalankannya secara efektif, bukan koalisi yang diawali dengan bagi-bagi kekuasaan. Koalisi terbatas yang dibangun SBY adalah koalisi dengan partai politik, tetapi tidak semua partai politik akan bergabung dalam koalisi ini. Bentuk koalisi terbatas tersebut akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun sebelum SBY terpilih menjadi presiden dan bertujuan agar pihak-pihak yang ikut didalamnya dapat mengantarkan SBY ke kursi kepresidenan. Sedangkan tahap kedua akan dibangun setelah SBY terpilih agar nantinya mendapatkan dukungan dari parlemen.

Faktor kemenangan yang kedua adalah pelaksanaan kampanye untuk meraih dukungan dan simpati dari pemilih. Menurut SK KPU No. 35 Tahun 2004 pasal 15, ada 9 bentuk kampanye yang dapat dilakukan oleh Megawati maupun SBY. Bentuk-bentuk kampanye tersebut diantaranya : pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum, debat publik atau debat terbuka, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan (seperti acara ulang tahun; kegiatan sosial dan budaya; perlombaan olah raga; kegiatan keagamaan; dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada suatu tempat tertentu).

Esensi dari strategi yang dimainkan oleh kedua kubu baik Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla dalam rangka memenangkan pemilihan presiden adalah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran politik bagi rakyat dalam

memahami makna reformasi dan arti nilai demokrasi. Karena itu, pemilihan presiden kali ini bukan merupakan akhir perjalanan bangsa Indonesia, tetapi adalah bagian dari reformasi, demokrasi serta momentum menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena sesungguhnya reformasi itu sendiri adalah perpaduan dari perubahan dan kesinambungan yang masih relevan kita pertahankan, sebaliknya yang tidak sesuai kita perbarui. Begitu pula dengan hakikat demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karenanya apapun strategi yang dimainkan kedua kubu dalam rangka memenangkan pemilihan presiden, yang menentukan adalah hati nurani rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.